Paper Position : Kurikulum Multikulturalisme Untuk Pendidikan Berkeadilan**Tasrif¹, Ida Waluyati², Irfan³ dan Arif⁴**Corresponding Author: Tasrifaziz@gmail.com**Abstrak**

Multikultural adalah khazanah bangsa dan dunia. Multikulturalism harus menjadi dasar filosofis dalam membuat kebijakan dan perencanaan pendidikan. Pendidikan belum sepenuhnya berwajah multikultural. Nilai-nilai multikultur harus mengejewantah ke semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Kebijakan pendidikan yang tidak mengadopsi nilai-nilai multikulturalisme menyisahkan disparitas pendidikan antara pusat dan daerah, suku satu dengan lain. Sekolah menyambut dan menyediakan siswa yang berasal dari latar belakang budaya yang berbeda. Sekolah dan pendidik harus responsif secara cultural sebagai bentuk penghormatan terhadap pendidikan multikultural. Pendidikan multikultural adalah pendekatan progresif, alat untuk mentransformasikan pendidikan yang mengkritisi dan memperbaiki literasi rasial dan kebijakan yang diskriminatif di dalam pendidikan. Kurikulum yang multikultur harus diterapkan untuk menguatkan cita-cita keadilan sosial.

Key word : Kurikulum, multikulturalisme, pendidikan yang setara**Abstrac.**

Multiculturalism is the treasure of the nation and the world. Multiculturalism must be a philosophical building in making educational policies and planning. Education is not perfect yet multicultural face. Multicultural values must be manifested in all aspects of the life of the nation and state. Educational policies that do not adopt the values of multiculturalism separate educational disparities between the center and the regions, from ethnic to one another. The school welcomes and provides students who come from different cultural backgrounds. Schools and educators must be responsive as a form of respect for multicultural education. Multicultural education is a progressive approach, a tool to transform education that criticizes and improves racial literacy and discriminatory policies in education. A multicultural curriculum must be applied to reinforce ideals of social justice.

Pendahuluan

Indonesia adalah rumah bagi budaya-budaya. Multikultur adalah fakta sosiologis yang *indisputable* atau tidak dapat dibantah (Ali Maksum, 2004: 190). Fakta tentang Indonesia yang multikultur dapat dengan mudah disaksikan di sekitar kehidupan baik sebagai realitas kehidupan maupun sebagai sistem

nilai. Dalam nomenklatur budaya, Indonesia memiliki banyak suku, bahasa, agama, dan etnis yang hidup berabad-abad lamanya. Keanekaragaman kebudayaan Indonesia didukung oleh sekitar 300 suku, 200 bahasa daerah dan ribuan sistem nilai kultural dalam masyarakat (Assegaf, 2011: 309). Setiap unsur terkandung suatu

budaya yang sangat beragam sebagai “credo” dan sistem nilai bagi masyarakat. Masyarakat melalui berbagai tradisi termasuk pendidikan (Soobin Choi & Xinyi Mao, 2020: 1) memelihara kepercayaan dan nilai tersebut karena terbukti memberi banyak manfaat kepada pemeluknya. Nilai-nilai adalah manifestasi dari kebudayaan setempat. Budaya sebagai nilai dan praktek terus bertumbuh bersama dengan bertumbuh dan berkembang masyarakat di suatu wilayah geografis. Sepanjang manusia hidup maka selama itu pula manusia menciptakan kebudayaan. Manusia tidak pernah berhenti menciptakan kebudayaan. Nilai-nilai tersebut eksis menjadi *living culture*. Masyarakat ada karena nilai-nilai seperti ingin berkumpul, solidaritas, gotong royong, toleransi. Namun, sebagai negara yang multikultur dalam semua aspek, ditengarai rawan benturan yang berujung pada konflik. Karena itu, masyarakat hidup dibawah bayang-bayang konflik selama ketimpangan terus berada dalam masyarakat.

“Pendidikan multikultural adalah proyeksi global”, kata Jackson (2002). Bahkan pendidikan multikultur *becomes a political ideology*. Di Amerika konsep ini menjadi semacam *a pillar of society*. (Apple, Ball, & Armando Gandin, 2010; Ron Erlich & Gindi, 2018 : 1) mengatakan bahwa pendidikan tidak bisa dipisahkan dari konsep multikultur. Oleh sebab itu, pendidikan berbasis multikultur adalah sebuah keniscayaan. Dalam konteks Indonesia hal itu sesuai dengan amanah filososif yang terkandung dalam pembukaan UUD

45 dan Pancasila. Dua dokumen tersebut adalah landasan normatif yang membicarakan pentingnya mengakomodir semua kemajemukan bangsa. Sebenarnya multikultural itu adalah modal sosial menuju kejayaan bangsa karena di dalamnya menyimpan nilai-nilai luhur sebagai modal sosial.

Bangsa Indonesia juga telah hidup secara *co-existence* dan terbiasa dalam perbedaan. Konflik berbendera SARA sering menghiiasi laman demokrasi kehidupan masyarakat Indonesia yang majemuk (Heru Nugroho, 1997: 4). Tetapi, walaupun bangsa Indonesia sering terluka karena benturan sosial (*the clash of social*), namun Indonesia tetap berdiri utuh sebagai sebuah negara dalam bingkai multikulturalisme. Tetapi, kekayaan Indonesia yang bersumber dari nilai-nilai budaya yang majemuk tadi nyatanya belum “membumi” seluruh aspek kehidupan bangsa terutama masyarakat yang hidup dalam gugusan pulau-pulau dan daerah terpencil.

Selain bangsa yang multikultur, Indonesia juga memiliki catatan statistik populasi yang besar, bahkan terbesar keempat dalam tangga populasi dunia (UNFPA, 2010: 58). Ada sekitar 268 juta jiwa penduduk Indonesia (Kompas, 2020). Secara demografis, statistik ini bisa menjadi positif dan negatif tergantung bagaimana manajemen demografi yang digunakan dalam mengelola penduduk. Populasi besar tersebut terbentang luas dalam gugus-gugus pulau kecil dan besar yang tersebar diluruh penjuru Indonesia. Tragisnya para penduduk tersebut mendiami gugusan pulau

dalam suasana keterbatasan alami dan terstruktur (Baca: kemiskinan struktural dan alamiah).

Pendidikan multikultural ternyata masih menjadi wacana. Buktinya disparitas dan ketimpangan kualitas pendidikan Indonesia menjadi pemandangan umum bagi masyarakat. Disparitas mutu pendidikan antara satu daerah dengan daerah lain masih terjadi (Asadullah & Yalonetzky 2012: 1). Sebagai contoh masalah literasi dasar, akses pendidikan, pemerataan pembangunan, pemerataan bangunan (infrastruktur), kompetensi guru, media belajar dan uniformitas pendidikan. Kebijakan-kebijakan pemerintah yang berhubungan dengan urusan publik seringkali tidak tepat sasaran. Dalam asas pendidikan Indonesia sendiri dipandang belum menganut asas multikultur. Multikulturalisme belum ditafsirkan secara filosofis ke dalam praksis pendidikan secara universal. Padahal para pendiri bangsa telah merumuskan secara baik makna dan hakikat multikulturalisme dalam bingkai *bhineka tunggal ika*.

Sekarang ada suatu fenomena yang kurang disadari bahwa pendidikan dirancang secara mekanistik yang membuat peserta didik kurang memahami kebudayaan secara kritis. Sasaran pragmatis pendidikan sering mengejar target-target fungsional untuk mengejar ketertinggalan yang bersifat teknis, menyiapkan generasi yang *taken garanted* untuk menghadapi masa depan. Akhirnya peserta didik tersisih dari kebudayaan sendiri, tidak mengerti hingga membenci budayanya sendiri, padahal pendidikan adalah sejatinya sebuah

proses kultivasi dan preservasi kebudayaan. Peserta didik kemudian lebih mengenal dan menghormati kebudayaan orang lain yang secara moral belum tentu *acceptable* bagi budaya Indonesia. Padahal dalam konsep multikulturalisme bahwa kekuatan individu siswa ditentukan oleh budayanya sendiri bukan unsur budaya lain. Budaya-budayanya akan membentuk kepribadiannya, masa depannya, keutuhan dan kekuatan organik.

Kalau ditelaah, wacana di atas mempunyai implikasi yang sangat luas dalam pendidikan sepanjang hayat. Dengan demikian, pendidikan multikultural menghendaki penghargaan setinggi-tingginya terhadap harkat dan martabat manusia yang berbudaya. Diskusi akademis tentang paradigma multikultural mengindikasikan bahwa wajah pendidikan kita kurang mengakomodir perbedaan-perbedaan kultur yang dibawa oleh para peserta didik. Malah terkesan jika model-model yang digunakan dalam pembelajaran cenderung mengabaikan potensi-potensi peserta didik dan menggunakan pendekatan asing (*borrowing system*). Sejak era orde baru hingga jaman reformasi sistem pendidikan kerap mengabaikan atau belum dianggap penting realitas kultur dan kekayaan kebhinekaan budaya pada hal ia adalah *social modal* dan kekuatan dalam tatanan demokrasi.

Metode Penulisan

Metode penulisan yang digunakan dalam paper ini adalah dengan menggunakan pendekatan *content analysis and critics*. Hal ini bertujuan untuk melihat fenomena

dibalik makna pendidikan multikultur dalam perspektif kritis. Paper ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Pendekatan deskriptif kualitatif merupakan pendekatan yang berorientasi pada teori. Tulisan ini memang fokus mengupas beberapa literatur pendidikan multikultur sebagai bahan kajian dan studi komparative. Metode pengumpulan data melalui studi literatur kepustakaan yang bersumber dari buku dan jurnal yang berkaitan dengan pendidikan multikultur. Tulisan ini merupakan hasil dari diskusi mata kuliah pendidikan kewarganegaraan dalam tugas *paper potition*.

Hasil dan pembahasan

Sebagai gagasan, pendidikan multikultural mula-mula dibahas secara akademis di Amerika dan negara-negara Eropa Barat lainnya pada tahun 1960-an oleh gerakan *civil right movement* (Sutrisno, 2011: 104). Gerakan ini bertujuan untuk mengurangi praktik diskriminasi di tempat-tempat publik, di rumah, di tempat-tempat kerja, dan institusi pendidikan yang dilakukan oleh kelompok mayoritas terhadap golongan minoritas. Gagasan multikulturalisme ini dilatarbelakangi dari asumsi bahwa tiap manusia memiliki identitas, sejarah, pengalaman hidup dan kecenderungan psikologis yang beragam (Ainul Yaqin. 2005: 34).

Multikultural berasal dari kata "kultur". Elizabet B. Taylor (1832) dan L.H. Morgan (1818-1881) mendefinisikan kultur sebagai budaya universal untuk semua

manusia dalam berbagai tingkatan yang diadopsi oleh semua masyarakat. Sementara Emile Durkheim (1858-1917) dan Marcel Maus (1872-1950) mengatakan bahwa budaya adalah sekelompok masyarakat yang mengadopsi keterikatan simbol dalam masyarakat untuk diterapkan (Hasan, 2000: 159). Itulah sebabnya bahwa pendidikan multikultural memandang manusia secara luas dalam bingkai budaya. Pendidikan multikultural melihat ketidakadilan, kemiskinan, penindasan, keterbelakangan minoritas dari berbagai sisi sosial, budaya, ekonomi dan pendidikan (Mahfud, 2006: 179).

Sebelum perang dunia ke II, pendidikan multikultural adalah kajian yang masih asing dalam dunia akademis. Tidak banyak pakar terutama bagi akademisi yang mengambil peran untuk mengkaji secara mendalam tentang ide-ide multikulturalisme. Barulah kemudian terjadi gelombang perubahan pada kehidupan masyarakat Amerika sebagai akibat dari gejolak dan benturan kelompok rasis antara warga Amerika dan American-African. Benturan itu kemudian ditentang serius oleh Marthin Luther King. Gelombang perubahan ini memicu lahirnya pendidikan multikultur sejak dekade tahun 70 dan pada Abad ke 20.

Fatih Yilmaz (2015) mengatakan bahwa konsep multikulturalisme pertama kali secara resmi muncul beriringan dengan isu budaya, etnis, tuntutan sosial, dan politik minoritas nasional dan imigran di Kanada pada tahun 1971. Selanjutnya konsep multikulturalisme kemudian

digunakan secara luas di Australia, USA, dan Swedia secara resmi. Namun, akar gagasan pendidikan multikulturalisme sebenarnya telah ada setidaknya pada jaman Yunani Kuno. Menurut Musa Asy'arie (2005), pendidikan multikultural merupakan proses penanaman cara hidup menghormati, tulus, dan toleran terhadap keanekaragaman budaya yang hidup di tengah-tengah masyarakat *plural*. Menurut Barbara Houston (1996) bahwa multikulturalisme mengupayakan adanya kesadaran bersama untuk berbagi nilai (*shared values*) dan berbagi identitas (*shared identity*). Jadi dengan adanya pendidikan multikultural, diharapkan adanya kelenturan mental bangsa menghadapi benturan dan konflik sosial, sehingga persatuan bangsa tidak mudah patah dan retak. Itu artinya bahwa paradigma pendidikan yang berwawasan multikultural sebenarnya berangkat dari suatu kesadaran bahwa setiap manusia dan masyarakat memiliki potensi-potensi yang berbeda. Karena setiap manusia memiliki perbedaan potensi (kemampuan), maka proses pendidikan wajib dilaksanakan dengan prinsip kearifan budaya yang berbeda. Jangan sampai setiap potensi dan kekayaan yang dimiliki peserta didik diabaikan begitu saja. Akhirnya menimbulkan masalah baru dalam lembaga pendidikan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menjadi dasar yuridis pendidikan bahwa penyelenggaraan proses pendidikan sangat respek terhadap aspek multikultural masyarakat Indonesia. Pasal 4 ayat 1

terkait prinsip penyelenggaraan pendidikan, yakni pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia (*human right*), nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa. Pada pasal 12 ayat 1 juga disebutkan bahwa setiap siswa mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama. Hal tersebut berarti bahwa setiap sekolah atau lembaga pendidikan berkewajiban memberikan pendidikan agama sesuai dengan masing-masing agama peserta didik tanpa kecuali, bahkan termasuk peserta didik yang beragama minoritas sekalipun. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional menjadi semacam angin segar untuk mewujudkan kehidupan masyarakat multikultural yang sebenarnya. Komitmen politik untuk mengakomodir hak cultural peserta didik juga tertuang dalam peraturan pemerintah No. 55 Tahun 2007 bahwa setiap satuan pendidikan menyediakan tempat untuk menyelenggarakan pendidikan agama. Termasuk juga pendidikan yang beragam.

Namun begitu, Undang-Undang tersebut dirasa masih kurang, karena kenyataannya masih banyak proses pendidikan yang diselenggarakan berbagai sekolah atau lembaga pendidikan lainnya yang masih diskriminatif dan tidak mengakomodir keragaman cultural peserta didik. Selain itu, masih sering terjadi prejudis, konflik dan tindak kekerasan berdasarkan perbedaan

keyakinan, pendapat, identitas maupun gaya hidup. Fakta sosial empiris yang ada menunjukkan bahwa sebagai masyarakat multikultural, bangsa Indonesia dihadapkan pada tantangan yang bersifat lokal dan global. Fakta di lapangan juga berdasarkan penelitian bahwa ada sejumlah sekolah yang tidak mengakomodir keragaman tidak memberikan pengajaran agama secara maksimal kepada peserta didiknya.

Tarik menarik nilai-nilai etnisitas di tingkat lokal dan nilai-nilai kosmopolitanisme di tingkat global jika tidak dikelola dengan baik akan menjadi sesuatu yang bersifat disharmoni dan merusak keutuhan dan kesatuan bangsa. Untuk itu, pendidikan multikultural menjadi jawaban yang tepat untuk dapat diaplikasikan dalam proses pendidikan, di sekolah-sekolah baik negeri maupun swasta. Pada akhirnya, dengan pendidikan multikultural ini diharapkan agar proses pendidikan benar-benar mencerminkan kehidupan masyarakat yang multikultural, hingga dapat mencetak generasi baru yang terbuka menghadapi perbedaan. Pendidikan multikultural mengacu pada segala bentuk pendidikan atau pengajaran yang menggabungkan sejarah, teks, nilai, kepercayaan, dan perspektif orang dari berbagai latar belakang budaya. Di tingkat kelas, misalnya, guru dapat memodifikasi atau menggabungkan pelajaran untuk mencerminkan keragaman budaya siswa di kelas tertentu. Dalam banyak kasus, multikultur didefinisikan dalam arti seluas mungkin, meliputi ras, etnis, kebangsaan, bahasa, agama, kelas,

jenis kelamin, orientasi seksual, dan kekhasan - istilah yang digunakan untuk siswa dengan kebutuhan khusus atau cacat.

Berkaca pada kurikulum pendidikan Amerika bahwa menurut hasil penelitian Donna Y. Ford (2014) bahwa Amerika dianggap sebagai induk tanah para imigran dan keragaman budaya. Hal ini dapat dilihat proses demografi yang terus berubah membuktikan kemajemukan. Setiap tahun, warna bangsa dan model sekolah di Amerika menjadi lebih berbeda secara rasial dan lingual. Dari keragaman tersebut, sekolah menyambut dan menyediakan bagi siswa yang berasal dari latar belakang budaya yang berbeda. Menurutnya bahwa sekolah dan pendidik harus responsif secara budaya sebagai bentuk yang mengikat apresiasi dan penghormatan mereka terhadap pendidikan multikultural. Dengan demikian, maka konsep kurikulum pendidikan yang multikultur lahir dari sebuah refleksi yang mendalam dari suatu kultur masyarakat yang geniun. Ide-ide faktual yang diangkat dalam pendidikan multikultur mencakup suku, ras, kelas sosial, ekonomi, gender, disparitas pendidikan, bahasa dan agama.

Pendidikan multikultural adalah pendekatan progresif untuk mentransformasikan pendidikan yang mengkritisi dan memperbaiki literasi rasial dan kurikulum, praktik, dan kebijakan diskriminatif. Implementasi pendidikan multikultural tersebut sebagai pengejawantahan cita-cita keadilan sosial dan keadilan, pedagogi kritis, dan dedikasi untuk menyediakan

pengalaman pendidikan di mana semua siswa mencapai potensi penuh mereka sebagai warga yang secara sosial, budaya sadar, dan responsif terhadap budaya mereka. Oleh karena itu, pendidikan multikultural menjadikan sekolah sebagai pranata yang dapat menghilangkan ketidakadilan rasial dan meningkatkan hamoni rasial. Semua kurikulum harus dianalisis untuk memastikan akurasi dan kelengkapan.

Masyarakat multikultural merupakan hakikat bangsa Indonesia yang harus diakui dan diterima seluruh masyarakat Indonesia tanpa kecuali. Konsekuensi dari hal tersebut adalah menerapkan prinsip multikultural dalam berbagai bidang, termasuk dalam bidang pendidikan. Pendidikan adalah suatu proses yang menentukan, apakah suatu generasi dalam suatu bangsa berhasil menjadi generasi yang cerdas, tidak hanya terbatas intelegensi, namun lebih dari itu secara emosional dan spritual. Selain itu proses pendidikan juga hendaknya menghasilkan generasi yang menghargai perbedaan.

Addictive Approach

Pendekatan adiktif adalah salah satu pendekatan yang pernah ditawarkan oleh James Bank (1998). Ia sendiri adalah bapak semacam *social studies*. Pendekatan ini memaparkan bahwa pendekatan adiktif menyisipkan materi-materi pendidikan multikultral ke dalam kegiatan belajar mengajar di sekolah baik melalui *hidden curriculum* maupun *core curriculum*. Menurut (Zamroni 2019: 2) bahwa integrasi atau penyatuan mata pelajaran dalam

pendekatan yang holistik. a) kembangkan secara kontekstual, untuk memperoleh pembelajaran yang bermakna dimulai dari pengalaman siswa. b) ketrampilan dikembangkan lewat kegiatan yang sesungguhnya yang dihadapi siswa, c) menekan pada inkuiri dna pemecahan masalah. Menurut Zamroni (2020) bahwa integrasi materi ke dalam kurikulum dapat menggunakan pendekatan sebagai berikut.

Yang dilakukan oleh guru dalam pendekatan multikultural adalah menambahkan

konsep-konsep-materi, tema serta sudut pandang terhadap kurikulum tanpa mengubah kerangka dasarnya berupa struktur, tujuan dan karakteristiknya. Melalui pendekatan ini juga dilengkapi dengan referensi dan buku panduan dalam kurikulumnya. Inilah cikal bakal dari munculnya pendidikan multikultur. James mengatakan bahwa model adiktif “*can be the first phase in more radical curriculum reform effort designed to restructure the total curriculum and to integrate in with ethnic content, perspective, and frames of reference.*” Pendidikan multikultur berfungsi sebagai “*to help individuals gain greater self-understanding by viewing themselves from the perspectives of other cultures*”. Pendidikan multikultur sebagai upaya untuk membekali pesereta didik pengetahuan yang

komprehensif mengenai etnis, budaya, budaya orang lain.

Pendidikan multikultural dengan erspektif *unity in diversity*. Pendidikan multikultural adalah konsep atau ide sebagai suatu rangkaian kepercayaan (*set of believe*) dan penjelasan yang mengakui dan menilai pentingnya keragaman budaya dan etnis dalam membentuk gaya hidup, pengalaman sosial, identitas pribadi dan kesempatan-kesempatan pendidikan dari individu, kelompok maupun negara. Pendidikan multikultural dapat dipahami sebagai proses atau strategi pendidikan yang melibatkan lebih dari satu budaya, yang ditunjukkan melalui kebangsaan, bahasa, etnik, atau kriteria rasial. Pendidikan multikultural dapat berlangsung dalam *setting* pendidikan formal atau informal, langsung atau tidak langsung. Pendidikan multikultural diarahkan untuk mewujudkan kesadaran, toleransi, pemahaman, dan pengetahuan yang mempertimbangkan perbedaan kultural, dan juga perbedaan dan persamaan antar budaya dan kaitannya dengan pandangan dunia, konsep, nilai, keyakinan, dan sikap.

Pendidikan sebagai kategori sosial sepatutnya berkontribusi dalam menyelesaikan kesenjangan, disparitas dan konflik sosial yang terjadi dalam masyarakat. Minimal pendidikan harus mampu memberikan penyadaran dan pencerdasan kepada masyarakat. Pendidikan harus mammemberikan tawaran dengan cara deonstruksi konsep lama menuju kurikulum pendidikan yang faktual berbasis pada keberagaman. Pendidikan harus

menghormati perbedaan suku, agama, ras etnis budaya masyarakat yang multikultur. Dengan demikian maka pendidikan akan berperperan penting sebagai alat tranformasi budaya, bukan sebagai alat represi kekuasaan.

Pendidikan Multikultural di Sekolah.

Thomas Akintayo (2014 : 6) menawarkan paradigma universalisme multikultur. Ia melihat bahwa multikulturalisme adalah realitas dunia yang tidak dapat dibantah. Multikulturalisme adalah kekuatan dan tulang punggung masyarakat modern (*backbone*), khususnya kasus-kasus di negara-negara yang minoritas nasional dan masyarakat adat negara negara imigrasi Misalnya seperti USA, Canada dan Autralia. Universalisme multikultural bahwa sudah tampilkan di situs-situs lembaga yang menyediakan perawatan social bagi orang tua. Badan ini akan menyediakan dan menggunakan teks yang menggambarkan kategori multikultur, inklusi, keanekaragaman, sebagai simbol kesetaraan dan keterbukaan universal untuk etno budaya.

Begitu juga dengan yang terjadi di Inggris misalnya. Inggris adalah contoh negara modern yang menjunjung tinggi multikulturalisme. Menurut Richard T. Ashcroft & Mark Bevir (2018 : 4) bahwa pendidikan multikultural adalah alasan dibalik terciptakan masyarakat modern yang berbasis etnik. Multikulturalisme adalah payung besar dalam kebijakan pendidikannya. Mereka menjunjung tinggi semangat keberagamannya.

Implementasi pendekatan pendidikan multikultural di Indonesia, haruslah berdasarkan realita Indonesia dan kearifan lokal masyarakat setempat. Dalam makna luas dengan memperhatikan karakteristik bangsa dan budaya Indonesia sendiri. Dalam implementasinya di Indonesia, pendidikan multikultural itu dapat dilihat atau diposisikan sebagai falsafah pendidikan yaitu pandangan bahwa kekayaan keberagaman budaya Indonesia hendaknya dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk mengembangkan dan meningkatkan sistem pendidikan dan kegiatan belajar-mengajar di Indonesia guna mencapai masyarakat Indonesia yang adil dan makmur.

Nilai budaya diyakini mempengaruhi pandangan, keyakinan, dan perilaku individu (pendidik dan peserta didik), dan akan terbawa ke dalam situasi pendidikan di sekolah dan pergaulan informal antar individu, serta mempengaruhi pula struktur pendidikan di sekolah (kurikulum, metode, pedagogi dan tujuan).

Sebagai contoh misalnya kurikulum dalam pendidikan multikultural di Irlandia merupakan contoh antara integrasi konsep nasionalisme dan multikulturalisme dalam kurikulum. Tulisan Audrey Bryan (2009: 7) misalnya mencoba mengeksplorasi hubungan timbal balik antara produksi identitas nasional dan multikulturalisme di sekolah dan masyarakat Irlandia. Ide-ide tentang ras dan bangsa saling terkait sebagai proyek identitas nasionalistik kontemporer menuju pendidikan multikultural (atau antar budaya) di Irlandia. Wacana – wacana tentang ras, bangsa-bangsa

diartikulasikan dalam dokumen kebijakan anti-rasis dalam kurikulum nasional, lalu kemudian wacana tersebut lebih luas ini ditafsirkan atau diakomodir di tingkat sekolah setempat.

Secara umum, di dunia Barat menjadi lebih beragam secara budaya, etnis tetapi juga ruang kelasnya. Untuk itu, guru dan siswa bertemu dalam ruang etnis dan keragaman budaya di ruang kelas mereka. Keragaman ini terkait dengan imigrasi yang terus tumbuh dan mobilitas yang meningkat. Fenomena ini terjadi di Belanda misalnya ada banyak sekali imigran dari Maroko, Turki dan Suriname dan Eropa Barat bekas negara Balkan. Akibatnya kelas dipenuhi dengan ruang kelas yang standar. Ruang kelas dipenuhi dengan multikultur yang ditandai dengan keragaman etnis, agama, bahasa ibu, dan tradisi budaya. Di sana ada semakin banyak siswa yang beragam etnis dan budaya di sekolah menengah pertama Belanda. Sikap multikultural guru, persepsi mereka tentang keanekaragaman budaya yang terkait dengan kebijakan sekolah dan iklim sekolah. Menghadapi keragaman itu, Menurut Anneke Dubbeld (2019: 2) bahwa guru dapat dibagi menjadi tiga jenis profil: (1) sikap asimilatif relatif, (2) tidak ada sikap asimilatif yang jelas, dan (3) sikap asimilatif sedang.

Dengan demikian, maka pendidikan multikultur menempatkan posisi peserta didik sebagai subject yang sejajar, tidak ada superioritas satu komponen kultural dengan komponen kultural lainnya. Pendidikan multikultur juga akan melatih dan membangun karakter

peserta yang demokratis, humanis dan pluralis dan lingkungan sosial mereka. Pendidikan multikultural memiliki posisi penting dalam pencapaian perdamaian. Bidang studi kajiannya adalah disiplin ilmu yang sosiologi, antropologi dan etnografi pendidikan aspek-aspek kebudayaan, terutama nilai-nilai budaya dan perwujudannya (norma, etiket atau tatakrama, adat-istiadat atau tradisi dan lain-lain mencakup “manifestasi budaya” agama) untuk/dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan pendidikan. Hasil telaah dan kajian ini akan diajarkan secara operasional (dan kontekstual).

Sekolah memiliki makna ganda. *Pertama*, berarti suatu bangunan atau lingkungan fisik dengan segala perlengkapannya yang merupakan tempat untuk menyelenggarakan proses pendidikan bagi kelompok manusia. *Kedua*, sekolah berarti suatu proses atau kegiatan belajar mengajar. Sekolah juga dapat diartikan sebagai sebuah organisasi, yaitu organisasi yang mempunyai struktur tertentu yang melibatkan sejumlah orang dengan tugas melaksanakan suatu fungsi untuk memenuhi suatu kebutuhan. Berbagai fungsi disediakan oleh sekolah, baik fungsi manifes maupun fungsi laten. Terkait hal tersebut, pendidikan multikultural termasuk dalam kelompok fungsi manifes sekolah, tepatnya dalam hal transmisi kebudayaan. Sekolah tidak hanya berfungsi untuk menambah pengetahuan baru, melainkan juga berfungsi untuk meneruskan nilai dan sistem normatif serta nilai-nilai di masyarakat.

Dalam melaksanakan fungsinya tersebut, sekolah harus

menjalani serangkaian langkah-langkah mulai dari *input* (masukan), proses, *output* (luaran), hingga dapat memberikan *outcome* baik *benefit* (keuntungan) dan *impact* (dampak) yaitu masyarakat menerima perbedaan atau masyarakat multikultural. Pertama, “*input*” atau masukan yang dalam hal ini adalah kurikulum, sarana dan prasarana, juga sumber daya manusia yang meliputi seluruh pihak atau material sekolah yang ada di sekolah seperti: kepala sekolah, guru, pegawai, dan murid-murid pria maupun wanita yang masing-masing memiliki kedudukan dan peranan. Dalam hal ini, hendaknya seperti sumber daya manusia baik siswa, guru/pengajar, kepala sekolah, dan karyawan sekolah saling berkontribusi menciptakan iklim akademik yang nyaman dan kondusif, di dalam maupun di luar proses kegiatan belajar mengajar. Kurikulum dari berbagai mata pelajaran yang diajarkan pada siswa baik kegiatan intrakurikuler maupun kegiatan ekstrakurikuler siswa harus memuat materi tentang multikultural. Pendidikan multikultur perlu diberikan kepada peserta didik sedini mungkin agar anak bisa menyadari tentang keragaman dalam lingkungan mereka, kesadaran tersebut setidaknya akan berpengaruh terhadap pola pikir, sikap, dan perilaku peserta didik ketika mereka berada dalam kehidupan masyarakat. Dengan demikian, maka tatacara kebiasaan-kebiasaan, aturan moral dan kebiasaan adat istiadat mereka dapat dimengerti sedini mungkin. Dalam pembentukan nasionalisme bahkan Varun Uberoi (2018: 5) menyebut bahwa multikulturalis di

Inggris telah mengadvokasi pentingnya identitas nasional sejak tahun 1970-an.

Kesimpulan

Pendidikan multikultural adalah keniscayaan dan kebutuhan bagi sebuah bangsa. Ia harus diwujudkan secara universal sebagai bentuk penghormatan terhadap wajah suatu bangsa yang multikultur. Pendidikan multikultur dalam perspektif bhineka tunggal ika harus dirumuskan dan dikembangkan dalam kehidupan sistem pendidikan dan kehidupan di sekolah-sekolah. Untuk mewujudkannya melalui proses rekonstruksi sosial tentang multikultur, kemudian diinternalisasikan melalui model kurikulum yang memuat nilai-nilai pluralitas, keberagaman yang menghargai multikulturalisme. Untuk mewujudkan pendidikan yang multikultur memerlukan sumber daya pendidik yang profesional dan kesiapan sekolah dalam proses pembelajaran.

Daftar Pustaka

- Abd. Rachman Assegaf .2011. Filsafat Pendidikan Islam; Paradigma Baru Pendidikan Hadhari Berbasis Integratif-Interkonektif. Jakarta: PT. Raja Grafindo
- Ali Maksum, Luluk Yunan Ruhendi. 2004. Paradigma Pendidikan Universal, Yogyakarta: IRCiSoD.
- Anneke Dubbeld, Natascha de Hoog, Perry den Brok & Maarten de Laat. (2019) *Teachers' multicultural attitudes and perceptions of school policy and school climate in relation to burnout*. 1-20.
<https://doi.org/10.1080/14675986.2018.1538042>
- Apple, M., Ball, S., & Armando Gandin, L. (2010). Introduction: Mapping the sociology of education: Social context, power and knowledge. In M. W. Apple, et al. (Eds.), *The Routledge international handbook of the sociology of education* (pp. 274e282). New York: Routledge.
- Asy'arie, Musa. 2004. *Pendidikan Multikultural dan Konflik Bangsa*. Kompas Cetak, 3 September 2004. http://www.ui.ac.id/download/kliping/030904/Pendidikan_Multikultural_dan_Konflik_Bangsa.pdf. Di akses 15 Februari 2013.
- Audrey Bryan. (2009). *The intersectionality of nationalism and multiculturalism in the Irish curriculum: teaching against racism?*. 12 (3). 297–317.
<https://doi.org/10.1080/13613320903178261>
- Banks, James A. (1989) "Approaches to Multicultural Curriculum Reform," *Trotter Review*: Vol. 3: Iss. 3, Article 5.
http://scholarworks.umb.edu/trotter_review/vol3/iss3/5
DOI:10.1177/1076217513512304.F

- Donna Y. Ford (2014) *Why Education Must Be Multicultural*. (37) : 59-62.
- Fatih Yılmaz. (2016). *Multiculturalism and multicultural education: A case study of teacher candidates' perceptions*. (3) : 1-13.
- Hasan, Mohammad Tholchah. 2000. *Islam Dalam Perspektif Sosio Kultural*, cet 2. Jakarta: Lantabora Pres.
- Houston, Barbara. 1996-2004. "Multiculturalism and a Politics of Persistence." ©Philosophy of Education Society. University of New Hampshire. <http://dx.doi.org/10.1080/2331186X.2016.1172394> <https://doi.org/10.1080/13698230.2017.1398443> <https://www.opendemocracy.net/en/culturalism-culture-as-political-ideology/>
- Jens-Martin Erikse. 2010. *Culturalism: culture as political ideology*.
- M. Ainul Yaqin. 2005. *Pendidikan Multikultural: Cross-Cultural Understanding Untuk Demokrasi dan Keadilan*. Yogyakarta: Nuansa Aksara.
- Mahfud, Choirul. 2006. *Pendidikan Multikultural*. Yogyakarta: Pustaka Belajar
- Richard T. Ashcroft & Mark Bevir. (2018). *Multiculturalism in contemporary Britain: policy, law and theory*. 21. (1) 1–21.
- Ron Erlich, R., & Gindi, S. (2018). *Are civics teachers different from teachers of other disciplines in their handling of controversial issues?* Education, Citizenship and Social Justice, 1e13. <https://doi.org/10.1177/1746197918767082>. Rosen, Y., & Perkins, D. (2013).
- Soobin Choi and Xinyi Mao. 2020. *Teacher autonomy for improving teacher self-efficacy in multicultural classrooms: A cross-national study of professional development in multicultural education*. International Journal of Educational Research. <https://doi.org/10.1016/j.ijer.2020.101711>
- Sutrisno. 2011. *Pembaharuan dan Pengembangan Pendidikan Islam*. Yogyakarta: Fadilatama.
- Thomas Akintayo, Juha Hämäläinen and Sari Rissanen. (2014). "Multiculturalism in social agencies for the aged". 3.(429) : 1-9. doi:10.1186/2193-1801-3-429.
- Varun Uberoi (2018). *National Identity – A Multiculturalist's Approach*. 21 (1) : 46-64. <https://doi.org/10.1080/13698230.2017.1398475>
- Heru Nugroho (1997) *Dekonstruksi wacana SARA negara dan Implikasinya terhadap kemajemukan Masyarakat Indonesia*. JSP. Volume I Nomor 2 Nopember 1997. FIS & Ilmu Politik. UGM. Yogyakarta.

UNFPA. 2010. Population Dynamics
and sustainable
development in Indonesia.
Jakarta.

Asadullah, M.N., Yalonetzky, G.,
2012. Inequality of

educational opportunity in
India: changes over times
and across states. World
Dev. 1151–1163.
<https://doi.org/10.1016>